

**ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN FULL DAY SCHOOL DI SMP IT
NURUL ILMI****Wasiyem, Bunga Khairunnisa, Mhd Zacky Bangun, Sri Ayuni, M Isnain
Nasution¹****Email: bungakhiarunnisa2911@gmail.com****Abstrak**

Pelaksanaan full day di sekolah merupakan kebijakan baru yang menerapkan full time study di terhadap aktivitas belajar di SMP IT Nurul Ilmi. Pendidikan bersifat dinamis, selalu melakukan reformasi untuk mengejar ketertinggalan negara-negara maju dalam pendidikan di SMP IT Nurul Ilmi. Namun, hal ini tentunya membutuhkan persiapan yang matang untuk meminimalisir terjadinya konflik. Kekhawatiran masyarakat muncul karena keberadaan sekolah penuh dikhawatirkan dapat merusak tatanan yang sudah ada, seperti pengajaran SMP IT Nurul Ilmi. Tentunya hal ini akan berdampak pada pemberdayaan masyarakat dan anak. Dalam kajian ini akan dibahas lebih detail tentang perumusan kebijakan produk dan isu-isu pelaksanaan sistem pendidikan umum purna waktu. Metode yang digunakan adalah literature review, sehingga administrasi pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pendidikan karena keduanya saling bersinergi. Demikian pula, pendidikan dan politik tidak dapat dipisahkan. Keduanya penting untuk tujuan yang sama memajukan negara. Tujuan, arah, nilai-nilai, dan anggaran pendidikan tidak serta merta merupakan hasil kesepakatan politik.

Kata kunci: *Kebijakan Pendidikan, Full Day School*

¹.Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, UIN. Sumatera Utara

Abstract

Implementation of a full day at school is a new policy that applies full time study to learning activities at SMP IT Nurul Ilmi. Education is dynamic, always carrying out reforms to catch up with developed countries in education at SMP IT Nurul Ilmi. However, this certainly requires careful preparation to minimize conflict. The community's concern arises because the presence of full schools is feared to damage the existing order, such as the teaching of SMP IT Nurul Ilmi. Of course this will have an impact on empowering the community and children. This study will discuss in more detail the formulation of product policies and the issues of implementing a full-time public education system. The method used is literature review, so that education administration cannot be separated from education policy because the two work in synergy with each other. Likewise, education and politics cannot be separated. Both are important for the same goal of advancing the country. Education goals, directions, values and budgets are not necessarily the result of political agreement.

Keywords:*Education Policy, Full Day School*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah entitas yang sangat dihargai saat ini. Pendidikan selalu berubah dari waktu ke waktu dan terus berkembang dengan waktu. Pengendalian sistem pendidikan di Indonesia saat ini diawasi langsung oleh KEMENDIKBUD (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) serta pembuat kebijakan atau kebijakan pendidikan. Seiring dengan pergantian kepemimpinan, tentunya Mendikbud memiliki cita-cita, tujuan, dan kebijakan yang berbeda-beda di setiap kelompok. Jadi jangan heran kalau kebijakan yang sekarang belum selesai, tapi yang baru sudah diputuskan sebagaimana kebijakan pendidikan melaksanakan system *Full Day School* sebagaimana yang dilaksanakan di setiap pondok pesantren di Indonesia.

Pendidikan dan agama merupakan unsur atau bahian komponen penting dalam suatu negara. Karena berkat suatu pendidikan terciptalah sumber daya manusia Indonesia yang cerdas dan religius. Memperkuat sumber daya manusia yang bermoral, spiritual dan berkarakter sangat baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sebenarnya kebijakan Sistem pendidikan Indonesia menghargai pendidikan agama dan sekolah agama dan memasukkannya ke dalam kebijakan pendidikan termasuk pedoman tentang pondok pesantren. Tujuan pendidikan dan pengajaran menurut UU No.4 1950 sudah No. 12 Tahun 1954, Bab II pasal 3 untuk membentuk pribadi yang bermoral dan warga negara yang baik demokratis dan bertanggung jawab atas kesejahteraan Masyarakat dan Rumah Tangga (UU RI No. 4 thn1950, Bab II, Pasal 3). Tujuan mengandung tujuan umum semua jenis

sekolah dan harus menjadi pedoman bagi semua Pendidikan dan Pengajaran (UU No. 4 Tahun 1950, Penjelasan Pasal [3] Bab II).

Argumentasi pesantren menarik sebagai ikon munculnya kebijakan system *Full Day School* yang dijadikan penelitian saat ini yaitu pesantren dapat mengintegrasikan sifat keislaman dan keindonesiaan, kehidupan yang sederhana, sistem dan manhaj (tujuan) yang terkesan apa adanya, hubungan kiyai dan santri yang akrab, serta lingkungan fisik yang serba sederhana. Walau di tengah suasana demikian, yang menjadi magnet terbesar pesantren adalah peran dan kiprah pesantren bagi masyarakat, negara, dan umat manusia yang tidak bisa dianggap sepele atau dilihat sebelah mata. Sejarah membuktikan besarnya kontribusi pesantren baik masa pra kolonial, masa kolonial, dan pasca colonial dalam membangun sumber daya manusia. Banyak pesantren masa kolonial menjadi pelopor, pendobrak, dan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Pesantren bersama masyarakat berjuang sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang.

Terkenalnya Pondok pesantren di Indonesia mulai sejak zaman walisongo. Ketika itu, Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel Surabaya dan menjadikannya pusat pendidikan di Jawa. Para santri yang berasal dari Pulau Jawa datang untuk menuntut ilmu agama. Di antara santri ada yang datang dari Gowa dan Talo (Sulawesi). Pesantren Ampel merupakan cikal bakal berdirinya pesantren-pesantren di tanah air dengan system pembelajaran yang berbasis *Full Day School*. Para santri setelah menyelesaikan studinya berkewajiban mengamalkan ilmunya di daerahnya masing-masing sehingga didirikanlah pondok-pondok pesantren dengan mengikuti pada apa yang mereka dapatkan di Pesantren Ampel.

Full Day merupakan salah satu kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017. Full Day dapat dianggap sebagai program studi sehari penuh dari pukul 07:00 hingga 16:00. Sistem full time school sendiri sudah lama diterapkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Singapura, Korea, dll. Dalam Pasal 2 Ayat 1 Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017, pendidikan sehari penuh dilaksanakan selama delapan jam sehari atau 40 jam seminggu. Mengikuti Pasal 5 ayat 1, mengatur bahwa hari sekolah digunakan bagi siswa untuk melaksanakan kegiatan kurikuler, ekstra kurikuler, dan ekstra kurikuler. Pendirian sekolah purna waktu bertujuan untuk membentuk kepribadian siswa sesuai dengan nilai-nilai yang diabadikan dalam UUD 1945 seperti integritas, kemandirian, nasionalisme, gotong royong dan religi (Taufika, 2019).

Dengan sekolah penuh waktudi SMP IT Nurul Ilmi, siswa menghabiskan sebagian besar waktunya di lingkungan sekolah di mana waktu dihabiskan dari pukul 07:15 WIB hingga sore hari pukul 15:30 bagi siswa untuk terlibat dalam pembelajaran yang terorganisir. Hal ini dapat meminimalisir ketidakhadiran siswa di sekolah, namun mereka dapat mengisi waktu luangnya dengan berbagai kegiatan yang kurang bermanfaat, bahkan mengarah pada hal-hal negatif, ketika siswa datang ke sekolah, hal itu sudah jelas. Kondisi aman karena ada guru yang mengawasi, sebaliknya jika di luar sekolah, pengawasan terhadap anak menjadi tanggung jawab orang tua. Setiap update yang ada tentunya tidak mudah untuk dimulai. Namun dinamika dunia pendidikan tidak puas dan berhenti pada kondisi

saat ini saja, melainkan harus selalu mencari inovasi dan pengembangan. Adanya kebijakan pendidikan sekolah penuh waktu menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena belajar sepanjang hari membuat anak tidak memiliki waktu untuk pengajian diniyah/Quran yang dilakukan pada sore hari. Kekhawatiran lainnya adalah anak-anak tidak dapat menyesuaikan diri dengan orang-orang di lingkungannya karena jam sekolah yang panjang. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan pendidikan penuh waktu agar tidak merusak tatanan yang ada di masyarakat (Rahem, 2017).

Penelitian ini dilakukan di SMP IT Nurul Ilmi, Deli Serdang, Sumatera Utara. Peneliti memilih SMP IT Nurul Ilmi sebagai lokasi penelitian dikarenakan sekolah ini telah menerapkan *full day school*. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa permasalahan timbul karena kebijakan *full day school* ini banyak siswa yang merasa kantuk dan lelah karena proses pembelajaran yang panjang, terlebih pada jam pelajaran terakhir. Harapan peneliti agar dapat memberikan saran bagi sekolah terkait hasil penelitian dan kajian ini sehingga dapat meningkatkan keefektifan kebijakan *full day school* terhadap pembelajaran di SMPI IT Nurul Ilmi.

Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode ini dipilih karena bertujuan untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dari hasil penelitian tersebut. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian

yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis pendekatan deskriptif yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kasus.

Studi kasus termasuk ke dalam penelitian analisis deskriptif yang mana penelitiannya terfokus pada suatu kasus tertentu yang diamati dan dianalisis secara cermat. Analisis ini dilakukan terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus yang diteliti, dalam penelitian ini kasus yang diteliti mengenai kebijakan pendidikan full day school. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif terhadap kebijakan pendidikan full day school dan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data yang diambil dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian yang bersangkutan dengan kasus yang diselidiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kebijakan merupakan upaya pengendalian agar peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan benar dan berjalan efektif. Tentunya dalam proses pendidikan hal ini menyangkut semua lembaga pendidikan, maka kebijakan pendidikan harus dirumuskan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Selain adanya aturan yang seragam, kepala sekolah memiliki kekuasaan untuk memberlakukan kebijakansekolahnya. Namun, keputusan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan bersifat dinamis, artinya dapat berkembang sesuai permintaan. Pada

dasarnya kebijakan pendidikan tidak jauh berbeda dengan rencana pendidikan (*education plan*).

Perencanaan dipersiapkan jauh sebelum pembelajaran berlangsung. Pembuatan kebijakan pendidikan diperlukan untuk jangka panjang. Berlawanan dengan kebijakan pendidikan, perencanaan pendidikan dibuat dalam jangka pendek, dapat dikaitkan dengan tahun ajaran yang akan datang. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017, kebijakan merupakan produk kerja politik karena semua proses yang terkait dengan kebijakan saling menguntungkan. Dalam proses politik, hal pertama yang muncul adalah pendidikan harus memenuhi harapan masyarakat, sedangkan pembangunan pendidikan memerlukan sinergi antara pendidik dan pegiat, memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pengembangan kebijakan pendidikan, memperhatikan sumber daya yang ada dan manfaatnya bagi masyarakat, meskipun masyarakat membantu dalam pembuatan kebijakan, namun keputusan terpenting ada di tangan pemimpin atau otoritas (Miftah, 2018).

Penelitian di SMP IT Nurul Ilmi diketahui menerapkan kebijakan *full day school* dalam kebijakannya. Hal ini diharapkan murid dapat memiliki penguasaan materi yang lebih baik dan lebih kompleks terhadap materi yang diberikan oleh guru atau tenaga pendidikannya. Apabila siswa kurang mampu memahami materi yang ada, guru harus menjadi garda terdepan dalam mengatasi hal tersebut. Kemudian jika dalam pelaksanaannya kurang baik, maka akan dilakukan evaluasi kedepannya sehingga manajemen pendidikan di sekolah dapat berjalan dengan baik.

Manajemen pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pendidikan karena keduanya saling bersesuaian. Gambar di bawah ini menunjukkan proses-proses pendidikan. Pertama, proses pendidikan harus dimulai dari analisis teori pendidikan. Dari pedagogi ke aplikasi teoretis. Kolumnis manajemen pendidikan juga harus menguji teori tersebut. Jika proses pendidikan tidak berjalan seperti alur gambarnya hal ini dapat menimbulkan masalah dalam kebijakan pendidikan (Danhas, 2021).

Perumusan kebijakan atau penyusunan alternatif kebijakan pendidikan termasuk dalam proses perencanaan analisis kebijakan pendidikan (Quade, 1984). Pemilihan opsi kebijakan menilai dampak pada manfaat sosial, politik dan ekonomi. Adanya kebijakan pendidikan harus menjadi solusi permasalahan pendidikan dan pendidikan dapat terus berkembang, sehingga perumusan kebijakan pendidikan harus bijaksana dan tidak menimbulkan masalah yang lebih kompleks (Arwildayanto et al., 2018). Rohman (2012) membagi pengembangan kebijakan pendidikan menjadi tiga fase: Akumulasi, artikulasi, akomodasi.

Dalam kebijakan pendidikan, ada yang disebut dengan kebijakan reaktif. Kebijakan yang responsif adalah dukungan dan tanggapan pemerintah serta masukan masyarakat. Dalam kebijakan responsif, tujuan utamanya adalah untuk menyeimbangkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat yang terkena dampak dan pemangku kepentingan. Adanya kebijakan pemenuhan keinginan memiliki dampak langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat daripada mendorong suatu negara untuk maju. Perencanaan kelembagaan dalam kebijakan ini adalah memperluas dan mendiversifikasi kelembagaan agar dapat tanggap terhadap

pemangku kepentingan dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan akan memfasilitasi pengadopsian dan implementasi hasil kebijakan baru selanjutnya oleh masyarakat (Chabibi, 2018). Perumusan kebijakan ini sama sekali tidak melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat. Seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga hasil kebijakan resmi, ditujukan untuk memenuhi kepentingan pemerintah, bukan kesejahteraan rakyat. Pihak berwenang hanya akan memikirkan bagaimana kebijakan ini menguntungkan mereka. Padahal, keberadaan pendidikan sangat penting bagi masyarakat. Pendidikan adalah sumber utama rezeki untuk kesuksesan masa depan. Hal ini menimbulkan konflik dalam masyarakat karena adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak (Suwanto, 2013, 2017).

Kebijakan full day school di SMP IT Nurul Ilmi memiliki beberapa tujuan, seperti diharapkan peningkatkan karakter siswa, seperti siswa diharapkan dapat mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, bisa mengerjakan hal-hal dengan kemampuan sendiri, dan tentunya dapat menjalankan shalat lima waktu, sehingga dapat dikatakan tujuannya adalah membuat disiplin, memiliki sikap mandiri dan memiliki iman yang kuat. Selain hal tersebut tentunya penguasaan materi juga sangat diharapkan terhadap siswa siswinya, karena *full day school* tentunya akan memberikan materi yang banyak sehingga siswa memiliki kemampuan dan pemahamannya yang lebih banyak. Namun, jika murid kelelahan dan kurang mengerti dengan yang disampaikan oleh pendidik, maka tentunya murid diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai pelajaran yang disampaikan.

Kebijakan full day merupakan salah satu dari sekian banyak kelompok politik ortodoks karena tidak mengarah pada kepentingan masyarakat. Tujuan pemegang izin adalah untuk mewujudkan visi dan capaian pemerintah dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Kurangnya keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan menyebabkan pelaksanaan sekolah siang terbengkalai. Dikhawatirkan dengan munculnya sekolah purna waktu, pendidikan Diniyah atau Madrasah yang sudah lama ada akan hilang di masyarakat. Jika Pendidikan Diniyah dihapuskan tentu akan menghancurkan para guru dan organisasi yang membangun Pendidikan Diniyah. Meski sempat menuai kontroversi, pengenalan pengajaran purna waktu di Indonesia dilakukan oleh sekolah swasta sebelum disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penerapan sistem sekolah penuh waktu, yang berlanjut hingga hari ini, baru dimulai setelah sekolah negeri disetujui.

Pembahasan

Pengertian full day school adalah sekolah penuh waktu. Secara etimologis merupakan proses belajar yang aktif dan terkondisikan yang berlangsung sepanjang hari atau kurang lebih 24 jam. Ada 2 kata pengertian utama yang perlu diketahui: Pertama, Proses pembelajaran bersifat aktif, transformatif, aktif dan sekaligus intensif. Perschool menggunakan sistem metode sekolah penuh waktu. Yang dapat dipahami sebagai memaksimalkan segala potensi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan mengoptimalkan pembelajaran. Transisi, menggunakan sistem sekolah penuh waktu, berarti menggunakan proses pembelajaran yang ditentukan untuk meningkatkan potensi penuh siswa atau

kepribadian siswa untuk keseimbangan yang lebih besar. Inovatif, sistem yang digunakan pada sekolah purna waktu terletak pada sistem yang mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana serta dapat menciptakan proses pembelajaran yang baik atau bermanfaat bagi seluruh potensi pengembangan perkembangan siswa. Kedua, Proses pembelajaran berlangsung sepanjang hari atau bisa disebut pembelajaran 24/24 karena pelaksanaan proses belajar mengajar berlangsung secara aktif. Dalam waktu 24 jam bukan berarti siswa belajar, kegiatan belajar lainnya tanpa istirahat. Jika proses pembelajaran digunakan 24 jam sehari, proses pembelajaran bukanlah proses pembelajaran yang diharapkan seperti yang kita ketahui bahwa manusia bukanlah robot yang dapat melakukan semua operasi atau proses pembelajaran dalam 24 jam. Dimana mereka membutuhkan waktu untuk rileks, istirahat, melepaskan perasaan yang mengganggu. Sistem pembelajaran terencana 24 jam mencapai pengoperasian yang bermanfaat.

Pendirian program studi purna waktu di beberapa lembaga pendidikan terutama di SMP IT Nuru Ilmi akhir-akhir ini dipicu oleh kekhawatiran terhadap sistem pendidikan tradisional yang disebut-sebut memiliki banyak kelemahan karena sistem pendidikan tradisional lebih bersifat intelektual, sementara tidak memiliki aspek emosional dan psikomotorik. (Azizy, 2000). Hal ini terjadi antara lain karena waktu di sekolah sangat terbatas dan interaksi selalu bersifat informal. Meskipun demikian, sistem sekolah model konvensional sampai batas tertentu telah memberikan kontribusi besar bagi para pendidik kita, yaitu: a) Sekolah melaksanakan tugas mendidik anak serta membina dan mengembangkan tingkah laku peserta didik yang dibawa oleh keluarganya. b) Sekolah mendidik dan

mengajar siswa untuk menjadi orang dewasa yang bermoral serta warga negara. c) Sekolah mendidik dan mengajarkan siswa untuk menerima dan menyerap budaya bangsa. d) Melalui bidang pendidikan, sekolah membantu peserta didik mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan kerja, sehingga peserta didik memiliki keterampilan kerja dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, saat ini sistem sekolah penuh waktu telah menjadi trend yang kuat dalam proses pendidikan di Indonesia. Banyak lembaga pendidikan telah menerapkan sistem ini dengan berbagai model. Istilah yang digunakan juga berbeda seperti; sekolah penuh waktu, sekolah berasrama dan program'ha. Dari perspektif sejarah, sistem sekolah penuh waktu sebenarnya bukanlah hal baru dalam dunia pendidikan. Sistem ini telah lama dipraktikkan dalam tradisi para pemikir melalui sistem asrama atau gubuk, meskipun ini merupakan bentuk tradisional dan sederhana.

Keuntungan dari full day school: 1) Dampak negatif kegiatan ekstrakurikuler dapat diminimalisir karena waktu belajar di sekolah yang lebih lama. 2) Siswa dididik oleh tenaga kependidikan yang terlatih dan profesional. 3) Adanya perpustakaan yang nyaman dan representatif turut andil dalam meningkatkan hasil belajar anak. 4) Siswa menerima pelajaran dan pelajaran praktis dalam agama (doa, doa sehari-hari dan lain-lain).

Kelemahan dari full day school: 1) Sistem sekolah full time seringkali menimbulkan rasa jenuh dan bosan pada setiap siswa. Sistem pemagangan dengan model full time school memerlukan banyak persiapan fisik, psikis dan intelektual yang baik. Jadwal dan rutinitas kegiatan pembelajaran adalah penerapan hukuman

atau hukuman secara penuh dan konsisten dalam rentang waktu tertentu akan menimbulkan kebosanan siswa. 2) Model sekolah formal memerlukan perhatian dan keseriusan pengelola agar proses pembelajaran di lembaga pendidikan menurut model sekolah reguler berlangsung secara optimal dan sungguh-sungguh. fisik, psikis, material dan lain-lain.

PENUTUP

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan full daydi SMP IT Nurul Ilmi merupakan terobosan pedagogik yang sangat visioner, yang dalam penerapannya dapat mengatasi berbagai permasalahan pedagogik yang meliputi aspek afektif, kognitif dan psikomotorik, namun dari semua kebijakan pendidikan yang bersifat saja publik. Dalam pelaksanaannya harus melalui beberapa tahapan, antara lain jajak pendapat, survei, tes dan evaluasi. Dalam hal ini, kebijakan full day school langsung dilaksanakan tanpa persiapan yang matang, sehingga dapat menimbulkan permasalahan lain selain full time school terhadap kondisi pendidikan, karena dikhawatirkan akan berdampak negatif pada jangka panjang. mendirikan sistem pendidikan Indonesia. Selain itu, dibalik segudang kelebihan sistem pendidikan full day school, terdapat juga beberapa kelemahan dalam penerapan sistem ini, antara lain diperlukannya kematangan dalam kepemimpinan sekolah, artinya kepemimpinan sekolah yang belum matang akan mengakibatkan kegagalan sekolah yang sangat serius. Selain itu, penerapan sistem pendidikan all day school dapat menimbulkan kebosanan di kalangan siswa, sehingga tujuan pendidikan tidak tercapai secara maksimal. Saran dalam kebijakan pendidikan full day dapat diketahui bahwa siswa dan guru

diharapkan memahami materi pendidikan tentang kebijakan sekolah sehari penuh di Indonesia. Kami berharap artikel ini dapat membantu pembaca memahami seperti apa kebijakan pendidikan full day school.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Murabbi. Sugiono. (2013). Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. In Mode Penelitian Kualitatif
- Arwildayanto, Sukung, A., & Sumar, Tune Sumar, S.Pd., M. P. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif Dan Aplikatif. In Kebijakan Publik.
- Azizy, A. Q. (2000). Islam dan Permasalahan Sosial. Yogyakarta: LKis
- Chabibi, M. (2018). Politik Pendidikan Tentang Kebijakan Full Day School (Analisis Karakter Kebijakan Publik). Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. <https://doi.org/10.31538/ndh.v3i2.9>
- Danhas, Y. (2021). Analisis Pengelolaan Dan Kebijakan Pendidikan/Pembelajaran. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=jl4kEAAAQBAJ>
- Mastuhu. 1994. Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren. Jakarta: INIS.
- Masyhud dan Khusnurdilo. 2003. Manajemen Pondok Pesantren. Jakarta: Diva Pustaka.
- Miftah, M. (2018). Menakar Kebijakan Full Day School (Studi Analisis Permendikbud No 23 Tahun 2017). Jurnal Perspektif. <https://doi.org/10.15575/jp.v2i1.14>
- Rahem, Z. (2017). Dampak Sosial Pemberlakuan Full Day School (Menimbang Mafsadat- Masalahat Permendikbud 23/2017 Dan Perpres 87/2017).

Suwarto, D. (2013). Pengembangan Tes Diagnostik Dalam Pembelajaran. Yogyakarta: PustakaPelajar.

Suwarto, S. (2017). Pengembangan tes ilmu pengetahuan alam terkomputerisasi. Jurnal Penelitiandan Evaluasi Pendidikan, 21(2), 153-161.

Taufika, R. (2019). Implementasi Kebijakan Pendidikan Tentang Full Day School Dalam Menumbuhkan Karakter Sisiwa di SDIT Bunayya Medan: Studi Deskriptif pada Pelaksanaan Full Day School. Universitas Pendidikan Indonesia.

Wahid, Abdurrahman. 1988. "Pesantren Sebagai Subkultur", dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), Pesantren dan Pembaharuan, cet. IV. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, LP3ESZed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. In Yayasan Obor Indonesia. Driyakara, Driyakara Tentang Pendidikan (Yogyakarta: Kanisius, 1980) hlm.,12